

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu penunjang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak, Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik. Semua dibiayai oleh pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Karena itu pajak merupakan wujud dari suatu pembangunan negara. Pembayaran pajak merupakan bentuk dari kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak, khususnya badan usaha untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perusahaan Perseroan Komanditer (CV), dll yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Ada beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang telah beberapa kali diubah atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perpajakan Indonesia secara umum menganut *self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam system tersebut masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang menjadi tanggungannya. Selain menganut self assessment system, Perpajakan Indonesia juga menganut *witholding system* atau system pemotongan yaitu suatu cara pemungutan pajak yang member tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang menggunakan *witholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak Penghasilan Pasal 21.

Objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 salah satunya adalah imbalan sehubungan dengan jasa maklon yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jasa Maklon berdasarkan 70/PMK.03/2010 yaitu jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa maklon ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur, salah satunya oleh PT. Yuasa Battery Indonesia untuk membantu dalam penyelesaian pekerjaannya, tarif pemotongan PPh pasal 23 antara lain sebesar 15% dan 2%.

Dalam hal ini, PT. Yuasa Battery Indonesia selaku wajib pajak berkewajiban melakukan penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak penghasilan atas jasa yang diberikan oleh vendor tersebut sesuai dengan prosedur yang dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibahas tentang bagaimana Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Maklon terkait dengan Pasal 23. Dengan pemilihan judul untuk laporan PKL mengenai "*Tinjauan Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon pada PT. Yuasa Battery*

Indonesia” sebagai hasil dari kegiatan PKL yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan di PT. Yuasa Battery Indonesia.

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di perusahaan Manufaktur yaitu PT. Yuasa Battery Indonesia. Ruang lingkup pada laporan ini adalah bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan Pph Pasal 23 atas Jasa Maklon yang dilakukan oleh PT. Yuasa Battery Indonesia hingga proses pelaporan SPT pada kantor pelayanan pajak.

I.3 Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini yaitu untuk mengetahui prosedur penerapan pajak penghasilan atas jasa maklon pada PT. Yuasa Battery Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa maklon pada PT. Yuasa Battery Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan atas Jasa Maklon di PT. Yuasa Battery Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilas atas Jasa Maklon pada PT. Yuasa Battery Indonesia.

I.4 Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Yuasa Battery Indonesia adalah adalah perusahaan joint venture atau jasa dengan modal bersama dari Yuasa Battery Ltd. Jepang yang bergerak di bidang teknologi penyimpanan listrik DC (Direct Current), mulai dari berbagai jenis produk aki, UPS (Uninterruptible Power Supply), charger dan produk-produk aksesoris yang berhubungan dengan Battery. Group perusahaan Yuasa yang berpusat di Jepang adalah perusahaan termukaka di bidang industri aki dengan pendapatan US \$1,5 milyar (Total) dan jumlah pekerja mencapai 10.000 orang.

Pabrik ini didirikan di Tangerang 14 Mei 1975 bekerja sama dengan PT. Pakarti Yoga Indonesia, memproduksi aki untuk kebutuhan kendaraan bermotor dengan pasar domestic, OEM (*Original Equipment Manufacture*), dan ekspor. Pada tahun 1989 perusahaan menambah jenis aki produksi dengan jenis aki untuk kebutuhan industri (*Industrial Battery*) dan aki kering (*Maintance Free*)

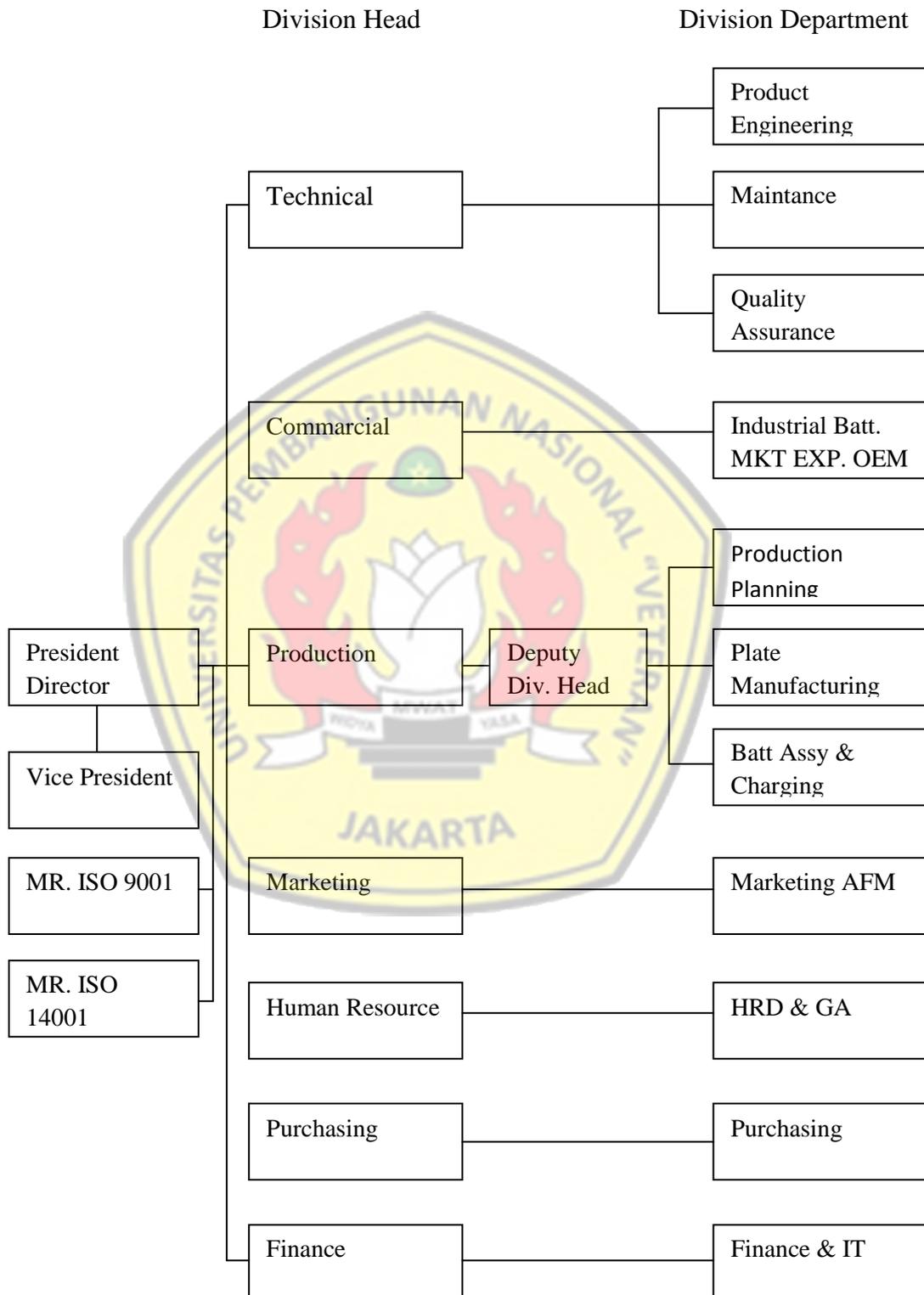
PT. Yuasa Battery Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 1,8 juta aki mobil, 3 juta aki sepeda motor dan 1,2 juta Ah (Ampere Hour) x cell aki untuk kebutuhan industri setiap tahun, dengan jumlah karyawan 1320 orang di dukung agen-agen penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. Yuasa Battery Indonesia memiliki bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan pembagian pemegang sahamnya PT. Pakarti Yoga Indonesia 50% dan GS Yuasa International Ltd. 50%.

Lokasi pabrik PT. Yuasa Battery Indonesia berada di JL. Mh Thamrin, Panunggangan-Tangerang menempati area 24.886M². perusahaan ini telah mendapatkan ISO 9002:1994 pada tanggal 14 September 1998 dan diperbaharui dengan ISO 9001:2000 pada tahun 2000 sampai sekarang dari badan sertifikasi BVQI (*Bureau Veritas Quality International*).

I.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimiliki PT. Yuasa Battery Indonesia adalah struktur fungsional, dimana karyawan digolongkan berdasarkan jenis kegiatan dalam divisi-divisi dan dipimpin oleh kepala divisi yang bertanggungjawabkan divisinya tersebut. Pimpinan tertinggi PT. Yuasa Battery Indonesia dipegang oleh (President Director). yang bertindak sebagai pengawas perusahaan yang dibantu oleh Wakil Presiden Direktur. Pelaksanaan kegiatan perusahaan dipimpin oleh Kepala Departemen yang dibantu oleh kepala divisi yang bersangkutan. Terdapat 6 divisi fungsional dalam PT. Yuasa Battery Indonesia, yaitu:

Company's Organization
PT. Yuasa Battery Indonesia



Gambar 1.

a. *Technical Division*

- 1) Bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh kegiatan di Departement Product Engineering, Maintance, dan Quality Assurance.
- 2) Menjamin kecukupan sumber daya dan tingkat keahlian personil dalam bidang teknik.
- 3) Menjamin kecukupan dan kondisi yang optimum bagi permesinan, peralatan, dan fasilitas penunjang produksi.

b. *Commarcial Division*

- 1) Membuat rencana jumlah penjualan jangka panjang dan jangka pendek dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mencapai jumlah penjualan sesuai rencana serta meningkatkan market share.

c. *Production Division*

- 1) Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses produksi hingga selesainya barang jadi untuk memenuhi kebutuhan pemasaran setiap bulan untuk setiap jenis produk.
- 2) Melaksanakan, memelihara dan mengembangkan setiap ketentuan atau persyaratan system manajemen mutu ISO 9001 dan system manajemen lingkungan ISO 14001 secara konsisten dan efektif.

d. *Marketing Division*

- 1) Membuat rencana jumlah penjualan jangka panjang dan jangka pendek dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mencapai jumlah penjualan sesuai rencana serta meningkatkan market share.
- 2) Melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan setiap ketentuan atau persyaratan system manajemen mutu ISO 9001 dan system manajemen lingkungan ISO 14001 secara konsisten dan efektif.

e. *Human Resource Division*

- 1) Mengamankan semua kebijakan atau prosedur di bidang umum dan ketenaga kerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran perusahaan.
- 2) Melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan setiap ketentuan atau persyaratan system manajemen mutu ISO 9001 dan system manajemen lingkungan ISO 14001 secara konsisten dan efektif.

f. *Purchasing division*

- 1) Melakukan pembelian untuk menjamin ketersediaan bahan baku atau komponen serta barang-barang lainnya untuk keperluan kelancaran proses produksi.
- 2) Melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan setiap ketentuan atau persyaratan system manajemen mutu ISO 9001 dan system manajemen lingkungan ISO 14001 secara konsisten dan efektif.

g. *Finance Division*

Divisi Keuangan diatasi oleh Presiden Direktur dan dibawah oleh Kepala Departemen Keuangan & IT. Serta memiliki wewenang untuk menyusun laporan keuangan, memeriksa laporan perpajakan, mengkoordinir pekerjaan di finance & IT dan menentukan pelaksanaan IT yang akan dikembangkan di lingkungan perusahaan. Adapun tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada Kepala Departemen Keuangan & IT :

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembayaran dan penerimaan keuangan dalam perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab dalam laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal.
- 3) Melaksanakan pengembangan IT yang diperlukan.
- 4) Melaksanakan, memelihara dan mengembangkan setiap ketentuan atau persyaratan system manajemen mutu ISO 9001 dan system manajemen lingkungan ISO 14001 secara konsisten dan efektif.
- 5) Merencanakan kegiatan pembayaran dan penerimaan keuangan.
- 6) Mengkoordinasikan penerimaan keuangan.
- 7) Mengkoordinasikan laporan costing.
- 8) Melakukan pengarahan dan pekerjaan di lingkungan finance & IT.
- 9) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan inventaris IT.
- 10) Melaksanakan tugas yang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing divisi diatas masih membawahi beberapa departemen. Kecuali Departemen Purchasing dan Departemen Human Resource hanya memiliki satu divisi karena dianggap jumlah sumber daya yang dimiliki sudah cukup untuk mengatur organisasi perusahaan.

I.6 Kegiatan Usaha

PT. Yuasa Battery Indonesia salah satu perusahaan yang bergerak dibidang aki, UPS, Regtifier, hingga produk-produk lain yang berhubungan dengan aki, tidak hanya aki mobil PT. Yuasa Battery Indonesia juga memproduksi berbagai kebutuhan aki motor. Aki Yuasa terletak pada pemilihan dan pemakaian bahan baku yang berkualitas tinggi serta pada proses perakitan yang sistematis, ketelitian tinggi dan sempurna. Melalui mesin pembuat serbuk timah hitam yang otomatis, modern, dan kapasitas besar.

I.7 Manfaat

a. Bagi penulis

Penulis sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan penulis yang berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan atas jasa maklon.

b. Bagi Masyarakat Akademis

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan referensi terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklon.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dimasa yang akan datang.